

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meninjau sebuah laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia adalah sesuatu yang menarik karena adanya desakan terhadap akuntabilitas di lembaga publik yang semakin besar baik di pusat ataupun di daerah. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan suatu akibat untuk para pihak tata kelola pemerintah dalam menyajikan informasi yang lebih baik terhadap publik. Para pengguna informasi akuntansi khususnya masyarakat umum, mengharapkan adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah khususnya sektor pemerintah daerah untuk mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik haruslah transparan. Salah satu karakteristik *good governance* adalah dengan adanya transparansi ((*United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2018:19)). Transparansi wajib dibangun atas fondasi kebebasan, sehingga informasi dapat diperoleh secara segera oleh pemakai. Hal tersebut buat memenuhi hak dasar umum terhadap pemerintah yakni hak buat mengetahui, dikasih informasi serta hak buat didengar suaranya.

Akuntabilitas dan transparansi dapat menyakinkan bahwa pengerjaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh personel pemerintah dapat berjalan baik. Hal itu sesuai tuntutan masyarakat supaya pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah dapat ditingkatkan baik kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik. Dasar pengambilan keputusan para *stakeholder* adalah informasi keuangan yang sudah dipublikasikan pemerintah.

Bentuk nyata untuk melaksanakan akuntabilitas serta transparansi pengendalian keuangan pemerintah yaitu dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2014 serta UU No.17 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan Keuangan Negara, yang mewajibkan gambaran serta isi informasi pertanggungjawaban pelaksanaan perhitungan penerimaan serta pengeluaran daerah yang disusun dan disajikan sesuai PP No.71 Tahun 2010.

Laporan keuangan OPD diberikan pada Dewan Perwakilan Rakyat/DPRD serta rakyat umum selesai diperiksa oleh Instansi Pemerintah Indonesia yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan. Pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan adanya prosedur informasi. Laporan keuangan disusun oleh karyawan yang mempunyai kompetensi dalam ilmu sistem akuntansi serta pengerjaan laporan keuangan daerah yang akibatnya bisa menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat untuk stakeholder (Tuasikal, 2007). Terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 adalah salah satu usaha pemerintah untuk melakukan perubahan atau sebuah reformasi pelaporan finansial dari sistem basis kas menjadi basis akrual untuk tujuan yaitu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang berkewajiban membuat laporan keuangan pemerintah daerah, dan melaksanakan fungsi pemerintahan dengan bekerjasama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat berjalan dengan maksimal. Setiap penyusunan LKPD yang dibuat oleh OPD diaudit oleh BPK dengan memberi opininya. Jika pendapat yang dihasilkan LKPD berupa WTP maka informasi keuangan tersebut mampu dikatakan wajar dan juga berkualitas.

Kenyataannya untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas ternyata tidak mudah. Menurut Wati et al(2014) pemerintah daerah masih memiliki suatu keterbatasan dalam hal kualitas sumber daya manusia, dimana karyawan belum mempelajari sistem akuntansi yang menjadi dasar pencatatan laporan keuangan. Hal itu sesuai data Badan Pemeriksa Keuangan yang membuktikan bahwa: dari 542 LKPD yang diselidiki, 411 LKPD mendapat penilaian WTP, 113 LKPD mendapat penilaian WDP serta 18 LKPD mendapat penilaian TMP.

Penelitian telah dilakukan pada kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah. Penelitian Zetra (2009) yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2009 di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat menemukan bahwa mekanisme daerah terus menghadapi kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan, akuntabel dan tepat waktu yang disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan kurangnya staf yang memiliki keahlian untuk melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian akuntansi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan daerah adalah penggunaan teknologi informasi. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola perekonomian daerah dan menyalurkan informasi ekonomi daerah (IKD) ke dalam pelayanan publik. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan potensi pemanfaatannya secara luas dapat memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk memperoleh, mengelola dan menggunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Hasil penelitian Zetra (2009) menunjukkan bahwa keinginan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, perangkat keras

dan perangkat lunak untuk perangkat daerah yang keluar dari LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit pengolahan untuk semua hal. Untuk mengelola sistem informasi keuangan secara efektif, setiap SKPD idealnya memiliki komputer pengelolaan keuangan khusus. Keterbatasan tersebut dapat mengakibatkan instansi pemerintah kurang menggunakan teknologi informasi secara optimal, yang dapat mempengaruhi nilai data akuntansi pemerintah daerah.

Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Pengendalian internal adalah cara untuk mengarahkan, mengontrol dan mengukur sumber daya organisasi, dan juga memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi penipuan dan melindungi sumber daya organisasi. Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan memastikan atau menyampaikan laporan keuangan yang andal dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, sistem pengendalian intern (SPI) menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan. BPK berharap agar pengawasan terhadap sistem pengawasan intern pelaporan provinsi dapat dilakukan bersama untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta menghindari kerugian keuangan negara untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan daerah adalah pengendalian keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada pengguna sesuai rencana yang telah disepakati, diperlukan beberapa media penting, yaitu pengendalian keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Tujuan pemantauan sistem pengendalian internal antara lain

untuk memperoleh keyakinan memadai tentang fungsi dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain kompetensi SDM, peneliti akan membahas faktor yang juga dapat memengaruhi nilai informasi laporan keuangan yaitu komitmen organisasi, pemanfaatan TI, pengawasan keuangan daerah serta sistem pengendalian internal. Faktor-faktor ini fokus pada analisis yang dilakukan oleh Ariesta (2013), Firdaus dan Nadirsyah (2015), Fransiska (2015), Dodopo et al (2017), Indrawati & Djasuli (2016), Efendi et al (2017), Arfianti (2011), Winidyaningrum (2009), Indriasari & Nahartyo (2008), dan Sukmaningrum (2012).

Motivasi dalam penelitian ini yaitu, karena salah satu pemerintah daerah yang sampai tahun 2016 laporan pemeriksaanterhadap laporan keuangan yang belum mendapatpenilaian WTP dan masih bertahan dengan penilaian WDPdalamlima tahun terakhir adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem pengelolaan keuangan pemda yang belum optimal, dan adanya sebuah kebuntuan dalam administrasi. Sehingga informasi keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sumenep tidakdapat menjadi yang terbaik.

BPK menemukan banyak distorsi dalam pengelolaan serta penggunaan keuangan daerah di banyak organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep. Sehingga Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan supaya Pemerintah di Kab.Sumenep dapat mengembalikan dana negara sebesar Rp. 6,8 miliar ke kas daerah. Itu terjadi karena masih ada beberapa kegiatan untuk merealisasikan pengadaan barang dan jasa yang tidak didukung oleh alat bukti.

Hasil temuan menunjukkan bahwa hampir semua OPD Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki total yang berbeda-beda yang harus dikembalikan.

Hal tersebut karena dikarenakan SDM serta pengendalian internal organisasi perangkat daerah masih lemah. Lemahnya kemampuan SDM disebabkan oleh lemahnya pengelolaan keuangan daerah di bidang administrasi dan birokrasi, lemahnya kepatuhan terhadap hukum, aturan, prosedur dan rencana yang ditentukan oleh pemerintah. Penyajian transaksi keuangan yang dilakukan harus jujur supaya informasi yang dihasilkan mudah dipahami, dipercaya, dan bermanfaat bagi pengguna itu sendiri.

Selain itu, melemahnya pengawasan keuangan daerah akibat kurangnya tenaga pengawas di masing-masing instansi dapat mempengaruhi hasil penyusunan keuangan daerah yang memadai, tepat dan akurat, dengan belum optimalnya pengawasan masing-masing instansi. Terkait penggunaan TI masih terdapat kendala terkait perangkat komputer yang digunakan, dan kurangnya SDM saat menggunakan TI yang tersedia.

Untuk mewujudkan laporan yang berkualitas tinggi, diperlukan SDM yang berkompetensi, komitmen organisasi yang tinggi, pemanfaatan teknologi yang tepat, keefisienan keuangan pemda, serta sistem pengendalian intern yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal yang dapat mempengaruhi hasil opini audit atas LK tahunan yang telah diaudit oleh BPK.

Dari latar belakang diatas, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut dengan judul yaitu **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep)”**. Dari penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan faktor komitmen organisasi yang bisa jadi mempunyai dampak nilai informasi

laporan keuangan pemda. Riset ini diharapkan bisa memberi masukan untuk Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut paparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam riset ini yaitu:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep?
5. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas, maka riset ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil riset diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikuini :

1. Untuk Peneliti: diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemda.
2. Untuk pemerintah daerah: diharapkan bisa memberikan masukan dan rekomendasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemda sehingga pemerintah daerah bisa meningkatkan nilai informasi keuangannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya: diharapkan bisa meningkatkan literatur akuntansi keuangan dan memperkuat analisis riset sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemda.